

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 28 Juli 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

A	Provinsi Jawa Barat	
1	Jabar Dapat Rp 10 Triliun	<i>Tribun Jabar/Hal.3</i>
2	Bank BJB Terima Dana PEN	<i>Pikiran Rakyat/Hal.12</i>

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Jabar Dapat Rp 10 Triliun

Entitas / Cakupan : Provinsi Jawa Barat

Sumber / Hal : Tribun Jabar/Hal.3

Edisi : Selasa, 28 Juli 2020

Jabar Dapat

Rp 10 Triliun

Bantuan Pemulihan Ekonomi dari Pemerintah Pusat

Diharapkan, Jabar-DKI (Jakarta) yang merupakan portal hampir di atas 30 persen ekonomi Indonesia bisa bangkit duluan.

RIDWAN KAMIL
GUBERNUR JABAR

BANDUNG, TRIBUN - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Jawa Barat menerima bantuan dana dari pemerintah pusat total Rp 10 triliun untuk pemulihan ekonomi di Provinsi Jabar pasca-pandemi Covid-19.

"Jabar menerima dukungan-dukungan yang luar biasa dari pemerintah pusat. Ada Rp 10 triliun yang disiapkan untuk Jabar," kata Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini melalui sambutan video *online*, Senin (27/7).

Dari sekitar Rp 10 triliun

tersebut, katanya, pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi tanpa bunga berjumlah Rp 4 triliun. Pemerintah pusat juga memberikan *viability gap fund* (VGF) atau dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Kabupaten Bandung yang berjumlah Rp 1,8 triliun.

"Tadi pagi bank bjb mendapat penempatan untuk pemulihan ekonomi Rp 4 triliun untuk disalurkan kepada UMKM-UMKM yang sedang melakukan pemulihan ekono-

mi," katanya.

Melalui dana pinjaman dari pemerintah pusat, Kang Emil berharap, Provinsi Jabar bisa bangkit lebih awal dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Diharapkan, Jabar-DKI (Jakarta) yang merupakan portal hampir di atas 30 persen ekonomi Indonesia bisa bangkit duluan," ujar Emil.

Diketahui, pemerintah pusat memastikan memberikan pinjaman kepada dua daerah yang terdampak virus korona cukup dalam, yakni Provinsi

DKI Jakarta dan Provinsi Jabar, sebagai percontohan.

Kedua daerah tersebut bahkan meminjam dana ke pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi. Penyaluran pinjaman dana tersebut dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI kepada pemerintah daerah.

Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jabar merupakan pemerintah daerah pertama yang memanfaatkan pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Daerah. (**muhamad syarif abdussalam**)

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Bank BJB Terima Dana PEN
Entitas / Cakupan	: Provinsi Jawa Barat
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.12
Edisi	: Selasa,28 Juli 2021

Bank BJB Terima Dana PEN

BANDUNG, (PR).-

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB) ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi penerima simpanan dana pemerintah. Penyimpanan dana tersebut merupakan bentuk dukungan dari pemerintah pusat agar Bank BJB dapat melaksanakan mandat untuk melaksanakan percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan sebaik-baiknya.

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bank BJB dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadyanto di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7/2020). Turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Penempatan uang tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 (PMK 70/2020) tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam

Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Yuddy mengatakan, Bank BJB akan menggunakan dana Rp 2,5 triliun tersebut sesuai dengan peruntukkan yang diharapkan. Dana tersebut akan digunakan untuk menstimulasi perekonomian melalui penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha, khususnya yang berskala mikro, kecil, dan menengah yang menjadi jantung perekonomian negara.

Ia mengatakan, Bank BJB mendukung pemulihan ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan rentan terdampak krisis. Bank BJB akan menjalankan fungsi intermediasi perbankan sambil tetap memegang teguh prinsip *prudential banking*. "Bank BJB sudah menyusun sejumlah rencana partisipasi dalam PEN, termasuk memanfaatkan secara optimal penempatan dana pemerintah," tuturnya.

Bank BJB, dikatakan Yuddy, juga telah secara kontinu menunjukkan dukungannya ke pemerintah melalui pe-

laksanaan instruksi pemulihan ekonomi, termasuk mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit, fokus pembiayaan UMKM, serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM melalui program-program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Pesat) dan sejumlah turunannya.

"Untuk pengawasan akan dilakukan seperti program-program pemerintah sebelumnya, KUR dan KCR. Kami pasti akan melaporkan penggunaan dananya kepada pemerintah/regulator," ujar Yuddy.

Bank BJB menjadi satu di antara tujuh bank pembangunan daerah (BPD) yang menjadi penerima simpanan dana pemerintah. Dana yang disimpan di Bank BJB merupakan yang terbesar.

Adapun tujuh BPD yang menerima penempatan dan pemerintah adalah Bank BJB Rp 2,5 triliun, Bank DKI Rp 2 triliun, Bank Jateng Rp 2 triliun, Bank Jatim Rp 2 triliun, Bank Sulut dan Gorontalo Rp 1 triliun, BPD Bali Rp 1 triliun, BPD Yogyakarta Rp 1 triliun. **(Ai Rika Rachmawati)*****